EVALUASI KEBIJAKAN PENGATURAN PASAR TRADISIONAL "TIPAR GEDE" DI KOTA SUKABUMI

Oleh
Sutardi
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Dan Humanior, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Email: sutardi087@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pengaturan pada pasar tradisional di Kota Sukabumi pada pasar Tipar Gede belum berjalan secara optimal, sehingga berdampak pada penataan, serta pengelolaan pasar yang tidak terarah. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana evaluasi terhadap kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Sukabumi pada salah satu pasar yang ada yaitu Tipar Gede, untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kebijakan tersebut tercapai dan mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi pada kebijakn tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pengaturan pada pasar Tipar Gede masih belum maksimal sehingga perlu adanya evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh pihak terkait.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Pengaturan Pasar

PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan salah satu pondasi utama perekonomian masyarakat. Bagi konsumen, adanya pasar akan barang hasil produksi. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya; Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern)

Pasar tradisional selalu identik dengan tempatnya yang kumuh, semrawut, kotor dan merupakan sumber kemacetan lalu lintas. Seperti halnya yang terjadi pada pasar Tipar Gede Kota Sukabumi yang mengalami hal serupa. Pasar Tipar Gede merupakan salah satu pasardi Kota Sukabumi yang mempunyai potensi ekonomi yang cukup tinggi, karena diuntungkan dengan akses keluar masuk pada pasar yang cukup strategis di tengah perkotaan. Namun dengan demikian pun ternyata Pasar Tipar Gede menghadapi berbagai permasalahan seperti; terjadinya disfungsi bangunan pasar, kurang tertatanya pedagang pasar, kurangnya sarana dan prasarana pasar seperti sarana kebersihan, perparkiran dan lain sebagainya.

Kebijakan mengenai pengelolaan pasar di Kota Sukabumi telah diatur dalam Peraturan Walikota (PERWAL) Kota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Namun adanya perwal tersebut jika melihat permasalahan pada Pasar Tipar Gede masih belum menunjukkan kebermanfaatan yang maksimal bagi objek kebijakan. Maka kiranya perlu dilakukan sebuah evaluasi untuk mengetahui pencapaian ataupun kekurangan dari kebijakan tersebut.

Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengaturan pasar tradisional (PERWAL Kota Sukabumi No. 22 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern) di Pasar Tipar Gede Kota Sukabumi.
2. Menggali faktor-faktor yang menghambat kebijakan pengaturan pasar tradisional Tipar Gede di Kota Sukabumi (Evaluasi PERWAL Kota Sukabumi No. 22 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern)

LANDASAN TEORI

1. Evaluasi Kebijakan

Kegiatan evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini, selain dapat memberikan satuan-satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan, juga dapat menjadi "pintu" baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya (Suharno: 2013). Menurut Patton dan Savicky dalam Nugroho (2003), evaluasi kebijakan merupakan evaluasi sitematis yang berkenaan dengan fisibilitas teknis dan ekonomi serta viabilitas politis alternatif kebijakan, strategi implementasi kebijakan dan adopsi kebijakan. Proses analisisnya dilakukan sebelum kebijakan atau setelah kebijakan (berbentuk deskriptif).

Evaluasi kebijakan adalah untuk menilai sejauhmana kebijakan itu dilaksanakan serta menilai seberapa efektifkah kebijakan publik itu dijalankan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun menurut pandangan William Dunn mengungkapkan bahwa ada enam kriteria dalam mengevaluasi suatu kebijakan yaitu :

Tabel 1. Kriteria Evaluasi Kebijakan

No	Kriteria	Penjelasan
1	Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
4	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan membuat preferensi/ nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
6	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber : (Dunn, 1994:610)

2. Pasar Tradisional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli brang dagangan melalui tawar menawar. Sedangkan menurut Sardilah dkk (2011), pasar tradisional adalah sebuah tempat yang terbuka dimana terjadi proses transaksi jual beli yang dimungkinkan proses tawar menawar.

Di pasar tradisional kebanyakan pedagang menjual kebutuhan sehari-hari. Contoh dagangan yang dijual di pasar tradisional seperti bahan-bahan makanan

ISSN 2722-9475 (Cetak)
ISSN 2722-9467 (Online)

berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, dan masih banyak lagi. Namun pasar tradisional memiliki kekurangan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, seperti keadaannya yang cenderung kotor dan kumuh sehingga banyak orang yang segan berbelanja di pasar tradisional.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Subyek penelitian menggunakan *purposive sampling,* dimana informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPDAGRIN) Kota Sukabumi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Tipar Gede, dan Pedagang pasar Tipar Gede, Sumber data berasal dari data primer melalui wawancara, dan data skunder dari dokumen yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data yang terkumpul akan diinterpretasian melalui reduksi data yaitu dengan memilih data-data yang penting dan akan digunakan. Data hasil reduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang terkait dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas

Dunn menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

Berdasarkan penelitian, menujukkan bahwa pelaksanaan tujuan Peraturan Walikota Kota Sukabumi No. 22 Tahun 2011 masih belum berjalan secara efektif. Diketahui bahwa Pedagang Pasar Tipar Gede masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya Perwal Kota Sukabumi No. 22 Tahun 2011 sehingga dengan ketidaktahuan tersebut pedagang pasarpun tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pedagang. Selain itu masalah yang kedua adalah APBD yang dimiliki Oleh Pemerintah Kota Sukabumi belum mampu mendanai renovasi gedung Pasar Tipar Gede yang sudah mulai rusak, mengingat bangunan pasar tersebut sudah berusia cukup yaitu sekitar 24 tahunan dengan seperti halnya diketahui tahun berdirinya adalah pada tahun1997 sehingga sudah seharusnya direnovasi atau dibangun ulang. Adapun Masalah yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran pedagang Pasar Tipar Gede dalam memperhatikan kebersihan di lingkungan pasar maupun barang dagangan mereka, sehingga kondisi pasar menjadi semakin kumuh.

2. Efisiensi

Menurut Dunn Efisiensi berkaitan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Diketahui bahwa pengaturan pasar tipar gede masih belum efisien, hal ini berdasarkan penjelasan dari kepala UPT Tipar Gede dijelaskan bahwa, adanya kegiatan pengaturan yang tumpang tindih dengan pihak pengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) karena dikelola pihak ketiga (preman) sehingga pihak UPT pun menjadi tidak leluasa dalam membuat aturan/pengaturan pasar; contoh hal seperti pengaturan sampah, yang sebetunya volume sampah jika hanya pedagang pasar Tipar Gede saja tidak akan terlalu besar, bisa saja hanya pada kisaran 1 ton, namun dengan adanya banyak PKL tersebut volume sampah mencapai dua kali lipatnya. Selain itu pihak UPT pun dengan kondisi seperti itu sebagai pengelola dilapangan menjadi susah dalam menertibkan pedagang yang ada, ditambah lagi dengan berkurangnya lahan parkir karena semakin terseret dengan adanya PKL yang bancakan.

3. Kecukupan

Menurut Dunn, Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan tujuan kebijakan dari Peraturan Walikota Kota Sukabumi No. 22 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kota Sukabumi masih belum memuaskan kelompok sasaran yaitu para pedagang pasar Tipar Gede. Hal ini disebabkan para pedagang kaki lima (PKL) yang berada di depan kios/los pasar tidak mau tertib, yang paling krusial adalah dikarenakan sampai menyebabkan penyempitan badan jalan sehingga pasar pun pada akhirnya hampir tidak mempunyai lahan parkir, bahkan menyebabkan kemacetan jalan. Selain itu dengan keadaan tersebut pasar Tipar Gede juga pada akhirnya tidak mempunyai tempat untuk bongkar muat barang. Serta kurangnya sarana tempat pembuangan sampah sementara yang mengakibatkan penumpukan sampah di area pasar.

4. Pemerataan

Pemerataan menurut Dunn erat hubungannya apakah manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok sasaran yang berbeda. Kriteria ini melihat apakah manfaat hasil pelaksanaan kebijakan sudah dirasakan oleh semua kelompok sasaran. Pemerataan berkaitan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik dari sebuah kebijakan.

Adapun hasil penelitian, pelaksanaan indikator perataan evaluasi kebijakan pengaturan pasar tipar gede di Kota Sukabumi, diketahui bahwa manfaatnya pengaturan tersebut belum dapat dirasakan secara sepenuhnya oleh kelompok sasaran. Adapun hal tersebut berdasarkan pernyataan para pedagang yang telah diwawancarai mengatakan bahwa "Kondisi Pasar Tipar Gede saat sekarang ini tidak tertata dengan baik, serta fasilitas pasar yang sangat minim mulai dari Wc yang hanya ada 1 (satu) saja yang dengan demikian dengan jumlah pedagang sekitar 400 an tidak cukup representatif. Seharusnya dengan adanya penarikan retribusi pada pasar juga harus sebanding dengan fasilitas yang memadai bagi pedagang".

5. Responsivitas

Menurut Dunn, responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Dari hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan dengan indikator responsivitas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota Kota Sukabumi No. 22 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kota Sukabumi belum memuaskan bagi kelompok sasaran yang dikelola yaitu pedagang pasar tradisional.

Bancakannya pedagang kaki lima di Pasar Tipar Gede menunjukkan bahwa lemahnya penegakkan aturan baik oleh Pemerintah Daerah, DISKOPDAGRIN ataupun pihak UPT sebagai pelaksana teknis di lapangan. Sehingga menjadi tanda bahwa pelaksanaan PERWAL No 22 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Sukabumi belum maksimal.

6. Ketepatan

Menurut Dunn menyatakan bahwa ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasional subtantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa proses pelaksanaan kebijakan pengaturan pasar tradisional Tipar Gede belum terlaksana secara tepat dan maksimal, hal ini dilihat dari beberapa hal seperti, pengaturan jarak antara pasar tipar gede dan Ramayana yang notabene adalah *Supermarket* namun saling berdekatan tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang Kota Sukabumi. Selain itu adanya disfungsi penggunaan lahan yang seharusnya diperuntukkan sebagai tempat

ISSN 2722-9475 (Cetak)
ISSN 2722-9467 (Online)

bongkar muat barang malah menjadi tempat PKL yang dengan demikian pun menyebabkan penyempitan pada jalan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta pembahasan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern pada pasar Tipar Gede Kota Sukabumi belum berjalan dengan baik. Adapun dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Efektivitas

Efektivitas penyelenggaraan kebijakan pengaturan pasar tradisional di pasar Tipar Gede dinilai masih belum optimal. Adapun hambatan yang dialami yaitu :

a. Kurangnya wawasan pedagang terhadap kebijakan pengelolaan pasar tradisional
b. Kurangnya kebersihan lingkungan dan barang dagangan belum terjaga

2) Efisiensi

Efisiensi penyelenggaraan kebijakan pengaturan pasar tradisional di pasar tipar gede dinilai masih belum optimal. Adapun hambatan yang dialami yaitu :

a. Lemahnya penegakan aturan untuk PKL
b. Jumlah fasilitas kebersihan yang minim/terbatas.
c. Belum tersedianya dana untuk melakukan perawatan pasar.

3) Kecukupan

Penyelenggaraan kebijakan pengaturan pasar Tipar Gede dinilai masih jauh dari yang diharapkan. Adapun hambatan yang dialami yaitu :

a. Tidak tegasnya penegakkan aturan bagi pedagang pasar maupun PKL.
b. Kurangnya lahan parkir pada area pasar Tipar Gede

4) Pemerataan

Manfaat dari pengaturan pasar tradisional pasar Tipar Gede belum dirasakan oleh keseluruhan pedagang dan konsumen pasar. adapun hambatan yang dialami yaitu :

a. Adanya disfungsi lahan pedagang pasar tipar gede oleh PKL.
b. Kurangnya komunikasi antara pedagang, UPT sebagai pengelola dan DISKOPDAGRIN Kota Sukabumi akan permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

5) Responsivitas

Pelaksanaan kebijakan PERWAL No 22 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Belum dilaksanakan secara tegas dan menyeluruh hal ini dilihat dari banyak nya PKL bancakan disekitar pasar tradisional yang tidak tertib dan susaah diatur.

6) Ketepatan

Penataan dan pengaturan pada pasar Tipar Gede tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan, tidak adanya konsistensi dan komunikasi yang baik secara struktural menjadi sebab dari hal tersebut.

Saran

1) Efektivitas

a. Perlu adanya sosialisasi kepada pedagang pasar Tipar Gede
b. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana kebersihan yang memadai

2) Efisiensi

a. Perlu adanya penindakan secara khusus oleh pihak yang berwenang
b. Membentuk petugas secara swadaya oleh pedagang agar kebersihan dan keamanan pasar dapat terjaga

3) Kecukupan

a. Ketegasan pengaturan PKL perlu segera dilakukan agar masalah cepat terselesaikan
b. Harus ada relokasi PKL atau, revitalisasi pasar Tipar Gede agar mampu menampung para pedagang.

4) Responsivitas

Perlu adanya evaluasi keseluruhan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan utama oleh DISKOPDAGRIN Kota Sukabumi.

5) Ketepatan

Pemerintah harus berperan secara lebih aktif dalam mendengarkan keluhan para pedagang dan pelaksana di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis* (Gadjah Mada University Press (ed.); Edisi Ke-2). Gadjah Mada University Press.
[2] Sardilah, dkk, 2011, Eksistensi Pasar Tradisional Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang Jawa Tengah, Semarang: Kementrian Budaya dan Pariwisata
[3] Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
[4] Peraturan Walikota (PERWAL) Kota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

ISSN 2722-9475 (Cetak)
ISSN 2722-9467 (Online)